

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SURAT KETERANGAN ASAL USUL (SKAU) DALAM TATA NIAGA HASIL HUTAN RAKYAT (Studi Kasus di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah)

Oleh :

¹Aditya Perdana Putra

²San Afri Awang

INTISARI

Departemen Kehutanan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: 51/Menhut-II/2006 tentang penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Hak. Kebijakan P.51/2006 sudah berlaku di Kabupaten Wonosobo. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis tingkat kepatuhan implementor (Kepala Desa/Lurah) terhadap standar dan prosedur kerja yang telah ditetapkan pemerintah, dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan dan keberhasilan implementasi kebijakan SKAU.

Penelitian dilakukan di desa terpilih dalam administrasi kabupaten Wonosobo yaitu Desa Kalimendong, Kecamatan Leksono dan Kelurahan Kepil, Kecamatan Kepil. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian kualitatif berdasarkan metode evaluasi kebijakan. Penelitian ini lebih terfokus pada proses pelaksanaan program (implementasi kebijakan) SKAU. Pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Sampel dalam penelitian ini adalah pengelola SKAU Dishutbun Kabupaten Wonosobo, Kepala Desa/Lurah, para pemilik depo, penebas, dan petani di dua desa sampel. Analisis data menggunakan analisis dikskriptif kualitatif.

Hasil dalam penelitian ini adalah tingkat kepatuhan implementor (Kepala Desa/Lurah) secara umum di Kabupaten Wonosobo masih rendah. Faktor-faktor mempengaruhi kegagalan dan keberhasilan adalah komunikasi, sikap pelaksana, kondisi lingkungan pemasaran kayu rakyat, sumberdaya, dan kejelasan isi kebijakan SKAU. Komunikasi: Koordinasi antara lembaga Dishutbun Kabupaten Wonosobo dan Lembaga desa masih belum berjalan dengan baik, proses sosialisasi: sebagian besar petani atau penebas tidak mengetahui manfaat SKAU. Sikap pelaksana (Kepala/Lurah): pemahaman pelaksana terhadap kebijakan kurang mendukung, kemampuan manajerial tidak sesuai dengan isi kebijakan SKAU (P.51/2006). Kondisi lingkungan: Sebagian besar petani di dua desa sampel menggunakan pola pemasaran kayu rakyat (sengon) sistem tebasan dan menggunakan sistem penjualan dengan cara penjualan beberapa tegakan tetapi dilakukan berkali-kali, SKAU sebatas ini digunakan oleh para pengepul (Depo), adanya peredaran blanko SKAU palsu, dan sebagian besar responden tidak setuju dengan adanya proses penebangan kayu sengon harus wajib melakukan pelaporan kepada Kepala Desa/Lurah. Sumberdaya: Kompetensi Kepala/Lurah dalam hal penetapan jenis kayu dan pengukuran kayu masih kurang baik, ketersediaan dana operasional dalam implementasi kebijakan SKAU tidak ada. Kejelasan isi kebijakan: Jaring-jaring peraturan antara PP.34/2002, P.26/2005, dan P.51/2006 masih saling tumpang tindih, isi Kebijakan dan standar prosedur kerja kebijakan SKAU (P.51/2006) masih belum jelas.

Kata kunci : kebijakan, SKAU, implementasi

¹ Mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta

² Staf Pengajar Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta

**THE IMPLEMENTATION OF “SURAT KETERANGAN ASAL USUL”
POLICY (SKAU) IN PRIVATE FOREST TRADE SYSTEM
(Case Study at Wonosobo Regency District Central Java)**

By :
¹ Aditya Perdana Putra
² San Afri Awang

Abstrac

Ministry of Forestry has published Forestry Ministry regulation No: 51/Menhut-II/2006 about Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) employing for wood forest product conveyance that came from authorization forest. The policy of P.51/2006 has applied in Wonosobo district. The aims of this research is for analyzing implementer obedience grade (head of village/Lurah) towards standard and work procedure that had enacted by government, analyzed some factors which influence failure and successful of SKAU implementation in the private forest trade system.

This research was done on August 27th – November 1st 2007 at Kalimendong village, Leksono and Kepil district, Wonosobo regency. Research method that used was qualitative method based on policy evaluation method. This research more focused to the process of SKAU implementation. Appropriation sample that used was purposive sampling technic. Sample in research are SKAU manager Dishutbun wonosobo regency, heads village, collectors (depo), middleman, and farmers in the sample village. Data analysis that used was qualitative descriptive analysis.

The result of this research were implementer obedience grade commonly at Wonosobo district still in low grade. Some factors that influenced failure and successful were communication, practitioner attitude, environment condition of private wood marketing, resources, and clarity of SKAU policy. Communication: coordination between Plantation and Forestry bureau of Wonosobo district and village bureau had not done well, socialization process: most of farmer did not know about the utilization of SKAU policy. Practitioner attitude (Head of Village): practitioner understanding towards to the policy still low, managerial skill did not suitable with SKAU policy contains (P.51/2006). Environment condition: most of farmer at two sample villages used private wood marketing (Sengon) cutting system and disposal system by selling some fields but it was done regularly, current time, SKAU was used by collector (Depo) only, deceptive SKAU form, and most of respondents disagree with procedure which obliged the respondents doing report step to the Head of village if they wanted to cut Sengon wood. Resources: the competence of head of village in wood species enactment and wood measuring was not well, there was no operational funding support for SKAU implementation. Clarity of SKAU: regulation nets among PP.34/2002, P.26/2005, and P.51/2006 still has overlapping way, policy contain and standard procedure of SKAU (P.51/2006) hadn't cleared yet.

Key words: Policy, SKAU, Implementation

¹ Student of Forestry Faculty Gadjah Mada University, Yogyakarta

² Lecturer of Forestry Faculty Gadjah Mada University, Yogyakarta